

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan tindakan direncanakan dan sadar yang memberikan pertolongan tentang mengembangkan potensi jasmani serta rohani yang diberikan orang dewasa kepada peserta didik demi mencapai kedewasaannya agar peserta didik bisa melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Pendidikan juga merupakan usaha sadar agar terciptanya lingkungan pembelajaran di mana siswa dapat aktif mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki dimensi spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moralitas yang baik, dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri serta masyarakat (Hidayat & Abdillah, 2019). Dalam proses pendidikan memang banyak terjadi interaksi, baik hubungan dan komunikasi antara manusia dengan manusia, maupun secara formal dan informal, terencana atau tidak, untuk memperkuat proses pelatihan harus memperhatikan komponen kurikulum dan mendukung proses yang berkesinambungan (Hasmori, et al., 2011). Hal ini dapat diartikan bahwa komponen yang penting dalam pendidikan dan yang mendukung suatu proses adalah kurikulum. Saylor, Alexander, Lewis (1974) mengungkapkan bahwa “Kurikulum adalah segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa belajar di dalam kelas, halaman sekolah, dan luar sekolah”. Kurikulum menjadi sangat penting bagi sekolah karena sebagai pedoman bagi guru. Khususnya untuk sekolah formal, dimana kurikulum memiliki peran sebagai pedoman mengajar. Oleh sebab itu kurikulum merupakan bagian dari pendidikan, tanpa kurikulum, pembelajaran tidak bisa dilakukan, jika kurikulum pendidikan dirumuskan secara cermat dan efektif, maka hasilnya akan tercermin dalam pembentukan masyarakat, kurikulum dan masyarakat sebenarnya saling bergantung. Keadaan seperti itu dapat dicapai melalui interaksi berbagai peran pendidikan seperti guru, siswa, orang tua dan masyarakat. Pendidikan

juga berperan memperkenalkan kepada siswa dari potensi bahaya dan resiko bencana alam yang ada di dunia khususnya Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan yang rentan terhadap bencana, dapat dilihat dari letak Indonesia secara geografis, berada diantara tiga lempeng utama dunia: Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut memiliki interaksi yang menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang mempunyai aktivitas gunung api dan gempa yang tinggi (Rahman, 2015). Oleh karena itu, Indonesia termasuk negara yang sering terjadi bencana alam. Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Mawarni & Ardira, 2020). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadi 3.522 bencana alam di Indonesia pada tahun 2022 (BNPB, 2022). Dalam hal ini pemerintah menekankan dalam UU Nomor 24 tahun 2007 mengenai “penanggulangan bencana” mempunyai tahapan sebelum bencana, selama tanggap darurat, dan setelah bencana. Undang-Undang ini berfungsi sebagai merupakan landasan pendidikan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Fenomena alam yang terjadi di lokasi tertentu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia disebut sebagai bencana alam. Fenomena ini terjadi setiap saat di wilayah Indonesia yang rawan bencana. Bencana alam merupakan fenomena geosfer yang diperbincangkan karena sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat dan pelajar. Pemahaman yang komprehensif tentang fenomena bencana alam memerlukan kajian geografi fisik dari ilmu geografi dalam konteks geografi nyata (Khafid, 2016). Bencana di Indonesia tidak hanya sebagai fenomena tetapi dijadikan sebagai pembelajaran peserta didik di sekolah tentang bencana, agar mereka bisa siap siaga jika terjadi bencana di sekitar lingkungannya (Febriansyah, et al., 2020). Untuk mengurangi resiko atau kerugian bagi manusia, harus memerlukan pengetahuan, pemahaman,

kesiapsiagaan, keterampilan untuk mencegah, mendeteksi dan mengantisipasi tentang tempat-tempat yang memang rawan terhadap bencana alam (Mawarni & Ardira, 2020). Dalam rangka meningkatkan ketangguhan satuan pendidikan terhadap bencana, kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), bertujuan untuk mencegah dan menghentikan dampak bencana yang terjadi di institusi pendidikan. Penyelenggaraan program SPAB dilaksanakan pada saat situasi normal atau pra-bencana, pada situasi darurat dan pasca bencana. Regulasi yang menjadi landasan dalam melaksanakan pendidikan kebencanaan di sekolah yang dijadikan acuan yaitu : Surat edaran menteri pendidikan nasional nomor 70A/MPN/SE/2010 tentang pengurangan risiko bencana di sekolah, Permendikbud nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal dan Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 110/p/2017 tentang perubahan sekretariat nasional satuan pendidikan aman bencana. Pengintegrasian pendidikan pengurangan risiko bencana perlu dimasukkan ke dalam sektor pendidikan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Penanggulangan Bencana pada tanggal 2 Februari 2019 di Surabaya yaitu “Edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini, terutama di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan kepada masyarakat melalui para pemuka agama”. Sebelumnya presiden juga menyampaikan hal yang serupa dalam sidang kabinet Paripurna tanggal 7 Januari 2019. Hal ini menjadi dorongan yang kuat untuk penerapan satuan pendidikan aman bencana dengan skala besar di seluruh satuan pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan non formal di berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dini sampai tingkatan atas dengan dukungan keluarga dan masyarakat. (Koswara, et al., 2019)

Pasal 8 ayat b Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” Pendidikan dan



pelatihan penanggulangan bencana yang disingkat Diklat PB adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis penanggulangan bencana. Dilansir dari kompas.com (2019) bahwa “Data Bank Dunia menunjukkan sekitar 76% sekolah di Indonesia berada di daerah rawan bencana. Artinya, sekitar 60 juta siswa bisa terkena dampak bencana. Sekolah menjadi salah satu wahana yang efektif untuk membangun budaya kesiapsiagaan bencana kepada anak didik, pendidik, tenaga kependidikan, dengan memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat terdekatnya. Kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan kebencanaan di sekolah menjadi metode berkesinambungan dan efektif untuk menyebarkan pengetahuan tentang kebencanaan. Maka dari itu peserta didik perlu mendapatkan pendidikan serta pelatihan tentang kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang di input kedalam salah satu komponen pendidikan yaitu kurikulum, pembelajaran tentang kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berkaitan dengan ilmu geografi. Siswa SMP sebagai representasi generasi muda, memiliki kecenderungan untuk lebih menerima dan memahami konsep-konsep baru, memberikan edukasi kebencanaan pada tingkat SMP memiliki dampak jangka panjang, dimana siswa membawa pengetahuan ini ke tahap pendidikan berikutnya. Oleh karena itu, Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta dengan kolaborasi pentahelix kebencanaan bersama mitra Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) membuat kurikulum Pelatihan Geografi Kebencanaan untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), tujuan dari pembuatan kurikulum ini adalah untuk menjadikan sekolah aman bencana untuk sekolah yang dekat dengan rawan bencana dan memberikan pedoman dalam pelatihan terkait peliputan bencana serta memberikan pemahaman dalam penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan untuk peserta didik sekolah menengah pertama. Pelatihan kesiapsiagaan bencana adalah pendidikan dasar yang dibutuhkan untuk membangun budaya yang aman dan kuat, khususnya untuk anak-anak dan remaja yang mana mengajarkan cara untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi dan juga cara

menghindari kecelakaan yang tidak perlu terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Daud, et al., 2014).

Menurut Aris Nurjatmiko, Kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor termasuk yang pertama terkena bencana banjir, tanah longsor, angin kencang dan bencana lainnya. Data ini merupakan data awal tahun 2022, dan Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan potensi bencana alam tertinggi di antara 27 wilayah administratif dan kota di Provinsi Jawa Barat. 26 Kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang termasuk kategori wilayah rawan longsor, salah satu kecamatan yang rawan longsor adalah Kecamatan Citeureup (BPBD Bogor 2022). Sehingga Kurikulum pelatihan geografi kebencanaan penting diterapkan di sekolah-sekolah di wilayah ini. Salah satunya adalah SMP Yaskitta Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengimplementasi kurikulum pelatihan geografi kebencanaan pada siswa SMP Yaskitta Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, pengimplementasian kurikulum ini dilakukan diluar jam pelajaran atau ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan non-pelajaran yang memberikan solusi bagi siswa untuk meningkatkan peminatan mereka ke bidang kesiapsiagaan bencana sehingga kurikulum ini tidak mengganggu kurikulum yang ada di sekolah tersebut, sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi bencana alam. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum pelatihan geografi kebencanaan yang efektif sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi sekolah menengah pertama dalam mengimplementasikan kurikulum ini pada saat diluar jam pelajaran atau ekstrakurikuler sekolah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dengan mempertimbangkan informasi dari latar belakang, masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pendidikan belum berperan memperkenalkan kepada siswa dari potensi bahaya dan resiko bencana alam
2. Kurangnya penerapan di dunia pendidikan tentang pengetahuan, pemahaman, pelatihan kesiapsiagaan, keterampilan untuk mencegah, mendeteksi dan mengantisipasi tentang tempat-tempat yang memang rawan terhadap bencana alam
3. Peserta didik perlu mendapatkan pendidikan tentang kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang di input kedalam salah satu komponen pendidikan yaitu kurikulum

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi di atas, maka peneliti memberi batasan masalah dalam Implementasi Kurikulum Pelatihan Geografi Kebencanaan Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, akan diImplementasikan kepada Siswa kelas VII SMP Yaskitta Desa Hambalang Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup di luar jam pelajaran sekolah dengan pelatihan kesiapsiagaan bencana longsor, hal ini dikarenakan bencana longsor merupakan bencana yang rawan di daerah tersebut.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu :  
Bagaimanakah efektivitas Implementasi kurikulum pelatihan geografi kebencanaan dalam meningkatkan pemahaman siswa SMP Yaskitta tentang kesiapsiagaan bencana longsor?



## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari kegiatan penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana dengan memberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana dan menggunakannya sebagai sumber informasi atau referensi dalam pembelajaran kurikulum pelatihan geografi kebencanaan
2. Manfaat Praktis
  - a) Untuk Peneliti, menambah ilmu dan wawasan mengenai Implementasi kurikulum pendidikan geografi kebencanaan tingkat SMP
  - b) Bagi Peserta didik, menambah pengetahuan dan membuka pemahaman terhadap bencana alam yang ada di Indonesia khususnya Desa Hambalang dan menambah pengetahuan tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
  - c) Bagi Guru, Sebagai inovasi untuk mensosialisasikan tentang kesiapsiagaan bencana alam melalui pelatihan
  - d) Bagi Sekolah, memberi informasi kepada warga sekolah mengenai Implementasi kurikulum pelatihan geografi kebencanaan untuk tingkat SMP
  - e) Dinas Pendidikan memberikan Informasi dan saran untuk membangun strategi dalam pengembangan kurikulum pelatihan geografi kebencanaan untuk tingkat SMP
  - f) Bagi Pemerintah (BNPB,BPBD, PMI dan Pemerintah Kabupaten), sebagai bahan evaluasi selaku pembuat kebijakan terkait kesiapsiagaan bencana